



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI**  
**KE KABUPATEN TANATORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PADA RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017-2018**  
**TANGGAL 29 JULI - 2 AGUSTUS 2018**

---

**I. PENDAHULUAN**

*A. Latar Belakang*

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Jember dan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu ke Kabupaten Tana Toraja.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, dan jaminan kesehatan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja. Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

*B. Dasar Kegiatan*

1. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 20 Juli 2017.
2. Keputusan Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 21 Mei 2018.

*C. Maksud dan Tujuan*

1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
2. Menggali informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN.
3. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi IX DPR RI di Kabupaten Tanatoraja Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Tanatoraja Provinsi Sulawesi Selatan terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

*D. Peserta Kunjungan Kerja*

Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Tanatoraja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

No	No. Angg.	Nama	Keterangan	FRAKSI
1	380	Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si	Ketua Tim	Gerindra
2	260	Ichsan Firdaus	Wakil Ketua	Golkar
3	137	Hj. Elva Hartati, S.IP.,MM	Anggota	PDIP
4	172	Imam Suroso, S.Sos., S.H., MM.	Anggota	PDIP
5	208	Marinus Gea, SE., M.Ak	Anggota	PDIP
6	157	Nurmansah E. Tanjung., SE., M.Si	Anggota	PDIP
7	312	H. Syamsul Bachri	Anggota	Golkar
8	239	Betti Shadiq Pasadigoe	Anggota	Golkar
9	301	Drs. Julianus Pote Leba, M.Si	Anggota	Golkar
10	315	Drg. Hj. Andi Fauzia Pujiwatie	Anggota	Golkar
11	330	dr. H. Suir Syam, M.Kes., MMR	Anggota	Gerindra
12	445	Anita Jacoba Gah, SE	Anggota	Demokrat
13	449	dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang	Anggota	Demokrat
14	447	H. Haerudin, S.Ag., MH	Anggota	PAN
15	504	Dra. Tina Nur Alam	Anggota	PAN

16	77	Dra. Hj. Siti Masrifah, MA	Anggota	PKB
17	42	Aryanto Munawar	Anggota	PKB
18	95	H. Ahmad Zainuddin, Lc	Anggota	PKS
19	510	H. Muhammad Iqbal, SE., M.Com	Anggota	PPP
20	14	Ir. Ali Mahir, MM	Anggota	Nasdem
21	-	Indra Iswani, S.Sos	Sekretariat Komisi IX DPR RI	
22	-	Lailan Safina, S.Sos	Sekretariat Komisi IX DPR RI	
23	-	Retno Adiyati, S.Ikom	Protokol Komisi IX DPR RI	
24	-	Fitriana Yuliawati, SKM., M.Kes	Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI	
25	-	Aryanti, S.H., M.H	Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI	
26	-	Helmi Darmawan	TV Parlemen DPR RI	
27	-	Rahayu Setyowati	Pemberitaan DPR RI	

### III. OBJEK YANG DIKUNJUNGI

1. Pertemuan dengan Bupati Tanatoraja beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dinas/Instansi terkait
2. Peninjauan ke RSUD Lakipadada
3. Peninjauan ke BLK

### IV. HASIL PELAKSANAAN KUNJUNGAN

#### 1. Kabupaten Tanatoraja Provinsi Sulawesi Selatan

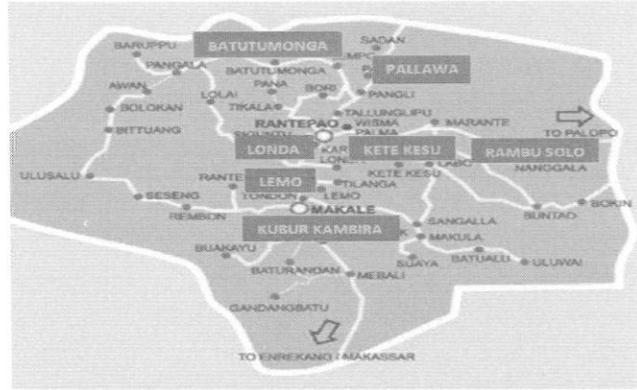
Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Makale. Kabupaten Tana Toraja memiliki luas 2.054,30 km<sup>2</sup> persegi, terletak antara 119022''14,322'-12002''37,566' Bujur Timur dan 2044''21,296'-3023''23,505' Lintang Selatan, dengan elevasi ketinggian 400-3.075 mdpl. Tana Toraja memiliki 19 kecamatan, 47 Kelurahan, dan 112 Lembang/Desa. Geografis Letak geografis, Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu.

Kondisi topografi kabupaten Tana Toraja terdiri dari pegunungan 40%, dataran tinggi 20%, dataran rendah 38%, rawa dan sungai 2%. Kondisi tanah cenderung agak curam, yaitu kemiringan 0% – 8% (datar) seluas 26.992,26 ha, kemiringan 9% – 15% (landai) seluas 36.129,00 ha, kemiringan 16% - 25% (agak curam) seluas 59.659,40 ha, kemiringan 26% - 40% (curam) seluas 85.497,90 ha, dan kemiringan >40% (sangat curam) seluas 112.298,10 ha.

Bagian terendah di kecamatan Bonggakaradeng dan bagian tertinggi di kecamatan Rindingallo. Temperatur rata-rata berkisar antara 16°C sampai 26°C dengan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 82% - 86%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, bagian utara wilayah kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Toraja Utara dengan ibukota Rantepao.

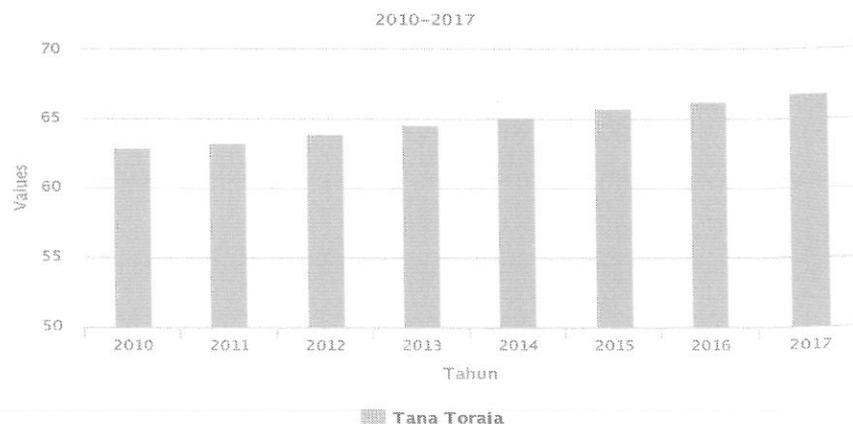


Gambar 1. Peta Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan

Kebanyakan masyarakat Toraja hidup sebagai petani. Komoditi andalan dari daerah Toraja adalah sayur-sayuran, kopi, cengkeh, coklat dan vanili. Perkenonomian di Tana Toraja digerakkan oleh 6 pasar tradisional dengan sistem perputaran setiap 6 hari. Keenam pasar yang ada yaitu Pasar Makale, Pasar Ge'tengan, Pasar Sangalla', Pasar Rembon, dan Pasar Salubarani.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tana Toraja mengalami kenaikan selama rentang waktu 2010 – 2017 (BPS, 2017). IPM tahun 2017 di Kabupaten Tana Toraja berada di angka 66,82, sedikit dibawah angka nasional yaitu sebesar 70,81. AHH Kabupaten Tana Toraja semakin meningkat yaitu di tahun 2016 yaitu 72,48 tahun dan di tahun 2017 yaitu 72,56 tahun. AHH ini berada diatas angka AHH nasional yaitu sebesar 71,06. Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan per hari per orang tahun 2017 sebesar Rp6801,-, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp6509,-. Akan tetapi Angka pengeluaran per kapita ini cukup jauh dibawah angka nasional yaitu di tahun 2017 sebesar Rp10664,-.

Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)



**a. BIDANG KESEHATAN**

- Belum ada perwakilan BPOM di Tana Toraja, akan tetapi BB POM Makassar secara regular melakukan pengawasan ke Kabupaten Tana Toraja
- Upaya pembangunan kependudukan dan KB di Kabupaten Tana Toraja terkendala oleh jumlah petugas KB yang sangat sedikit. Padahal PKB/PLKB adalah ujung tombak pelaksana program KKBPK di lini lapangan. Kabupaten Tana Toraja hanya memiliki 17 orang PKB/PLKB, sedangkan jumlah desa yang harus dibina ada 159 orang. Artinya, 1 orang PKB/PLKB membina 9 desa. Idealnya adalah 1 orang membina 1 desa.
- Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, khususnya bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, BKKBN menyalurkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) ke Kabupaten Tana Toraja sebanyak Rp5,4 miliar. Bantuan dana ini untuk melengkapi sarana dan prasarana pelayanan KB, serta dukungan sarana prasarana penyuluhan KB dalam mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga.
- Saat berkunjung ke RSUD Lakipadada, Kabupaten Tana Toraja, Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI menemukan pasien peserta BPJS Kesehatan Kelas 3 yang tengah mendapat pelayanan membeli obat sendiri di luar rumah sakit. Seharusnya peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan pelayanan di RS tidak boleh dipungut biaya apapun termasuk membeli obat di luar RS. Semua tindakan medis sesuai dengan petunjuk atau rekomendasi dari dokter itu harus dilayani oleh RS termasuk obat-obatan. Selain itu obat tersebut sudah 4 tahun ditarik dari peredaran.

RSUD LAKIPADADA

- RSUD Lakipadada adalah RS tipe C, sudah berdiri selama 30 tahun dan menjadi rujukan 4 kabupaten di Sulawesi Selatan. Dengan demikian rumah sakit ini sering mengalami kelebihan pasien (over kapasitas).
- Ada temuan ada pasien kelas 3 BPJS Kesehatan yang masih dikenakan *illegal cost sharing* terkait pembelian obat diluar RS seharga 41 ribu. Akan tetapi yang menarik adalah salah satu resep obatnya adalah dextromethorpan tunggal, padahal sejak tahun 2013 dextromethorpan tidak boleh dijual secara tunggal karena banyak digunakan untuk penyalahgunaan obat, sehingga per 2013 BPOM (seharusnya) sudah menarik obat tersebut dari peredaran. Akan tetapi hari ini ada temuan obat tersebut masih beredar bahkan masih bisa dibeli oleh pasien.

- BPOM (direktur pengawasan napza) langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan investigasi singkat. Ditemukan bahwa produk tersebut berbeda dengan Dextrometorphan yang telah ditarik karena obat yang diresepkan bernama Dexketoprofen.
- RSUD LakiPadada berkomitmen mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga jika ada pasien BPJS yang memerlukan obat tapi terjadi kekosongan obat yang dibutuhkan kemudian pasien tersebut membeli obat diluar maka kwitansi pembelian obatnya akan diganti oleh RSUD.
- RSUD LakiPadada juga adalah rumah sakit yang berada dalam wilayah tujuan pariwisata sehingga pelayanan RSUD LakiPadada sering mendapat keluhan dari wisatawan karena standar pelayanan dinilai belum maksimal. Untuk itulah Wakil Bupati Tana Toraja meminta kepada Komisi IX DPR RI dan mitra kerjanya agar dibantu anggaran sedikitnya Rp200 miliar untuk perbaikan pelayanan serta peningkatan fasilitas RSUD LakiPadada agar lebih memadai.
- Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi RSUD LakiPadada adalah kurangnya fasilitas kesehatan, dan minimnya dokter spesialis, beberapa gedung yang tidak tepat posisinya seperti posisi IPAL yang lebih tinggi dari bangunan rumah sakit

## b. BIDANG KETENAGAKERJAAN

### B.1. Kondisi Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk tana toraja tahun 2015 sebesar 228.984 orang atau 2,69 persen dari total penduduk di provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 8,52 juta, dengan angkatan kerja sebesar 126.148 orang atau 55 persen dari total penduduk. Di tahun yang sama, Jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan ditamatkan didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan sarjana strata-1 diikuti tingkat diploma dan akademi.

### Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK dan TPT di Kabupaten Tana Toraja, 2011–2015

Tahun	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - TPAK(%)	Tingkat Pengangguran Terbuka - TPT(%)
2011	97462	91101	6361	63.38	3.73
2012	109834	104749	5085	76.25	3.52
2013	104856	101440	3416	70.55	3.26
2014	120909	116965	3492	80.31	3.26
2015	126148	121118	5030	82.79	3.99

Sumber: Hasil Sakernas 2011-2015

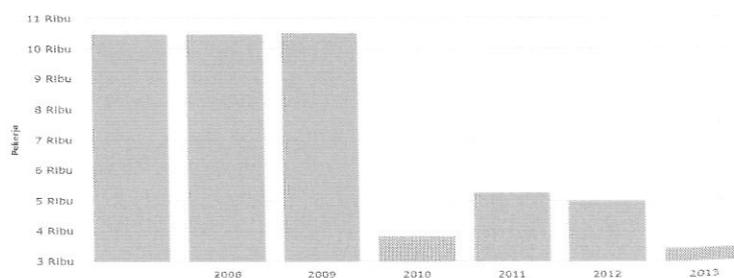
Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Tana Toraja provinsi Sulawesi Selatan jumlah angkatan kerja tahun 2015 berdasar data hasil Survey angkatan Kerja Nasional sebanyak 126.148 orang atau sekitar 82,79 persen dari penduduk usia kerja. Untuk kesempatan kerja di Tana Toraja Tahun 2015 sebesar 96,01 persen. Sementara jumlah pengangguran di kabupaten Tana Toraja tahun 2018 mencapai 5.422 orang angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 4.749 orang dari angkatan kerja. Jumlah tersebut tergolong tinggi disebabkan tidak adanya Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tana Toraja. BLK hanya terdapat di Kabupaten Toraja Utara, namun itu pun belum dapat beroperasi karena kondisi infrastruktur dan peralatan tidak memadai. Ketiadaan BLK di Tana Toraja menyebabkan SDM generasi muda Tana Toraja sulit terserap lapangan kerja.

Selain itu dukungan perusahaan milik negara (BUMN) dalam perekrutan tenaga kerja sangat kurang sehingga menjadi faktor tingginya angka pengangguran. Hingga saat ini dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Tana Toraja sudah bekerjasama dengan perusahaan swasta dan lembaga pelatihan lain di Kota Batam dalam upaya meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat direkrut namun belum terserap optimal.

Guna mempersiapkan agar tenaga kerja trampil dan siap kerja, pemerintah kabupaten Tana Toraja akan mendirikan Balai Latihan Kerja dimana usul sudah disampaikan ke pemerintah pusat, hanya tinggal mencari lokasi dan gedung yang akan menjadi lokasi BLK.

Berikut data jumlah pengangguran di Kabupaten Tana Toraja tahun 2007 sampai 2013:

**Jumlah pengangguran di Kabupaten Tana Toraja,  
Sulawesi Selatan 2007 - 2013**

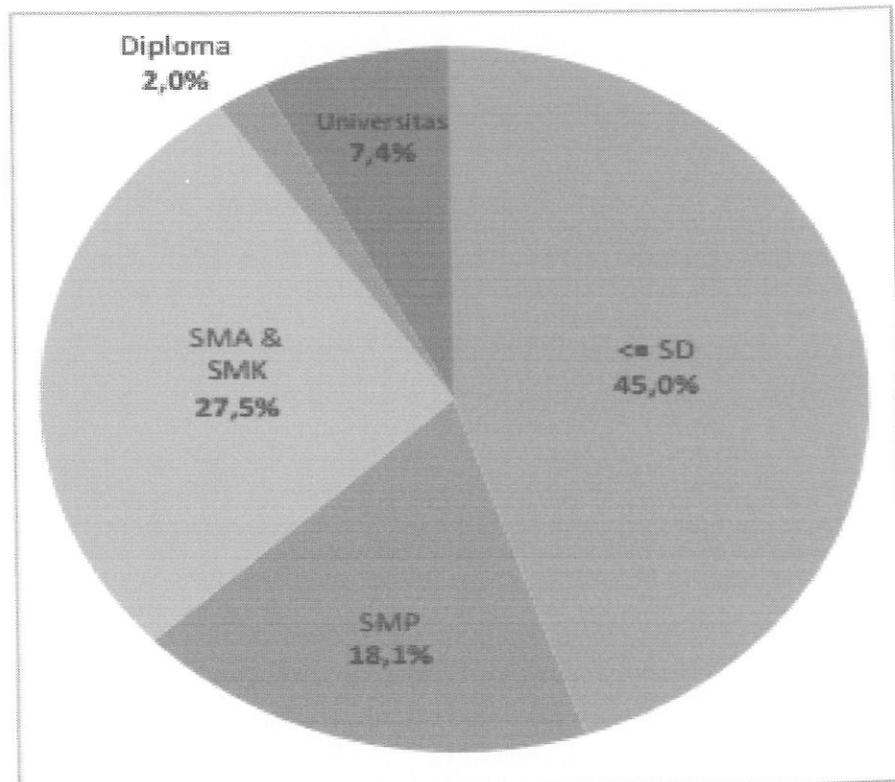


Berdasar bidang sektor utama pekerjaan, sektor pertanian merupakan sektor yang mendominasi pasar tenaga kerja di kabupaten Tana Toraja sebesar 72,61 persen yang diikuti sektor jasa sebesar 13,08 persen termasuk jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, diikuti sektor industri, perdagangan, akomodasi, pertambangan, transportasi dan lainnya sebesar 14,31 persen. Hal ini menunjukkan banyaknya penduduk yang bekerja di Tana Toraja yang banyak tinggal di daerah pedesaan yang lebih banyak bekerja di sektor pertanian.

Melihat kondisi Tana Toraja yang sangat subur, perlu dikembangkan teknologi pertanian dan pelatihan di bidang pertanian sehingga pembangunan desa dapat dilaksanakan.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Tana Toraja tidak sejalan dengan angka pengangguran. Tingginya perekonomian tidak diikuti dengan turunnya tingkat pengangguran. Tahun 2016, tingkat pengangguran Tana Toraja meningkat 3,11 persen dan meningkat di tahun 2017 menjadi 4,24 persen.

### Penduduk Bekerja di Kabupaten Tana Toraja Menurut Tingkat Pendidikan , 2015



Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja 2016

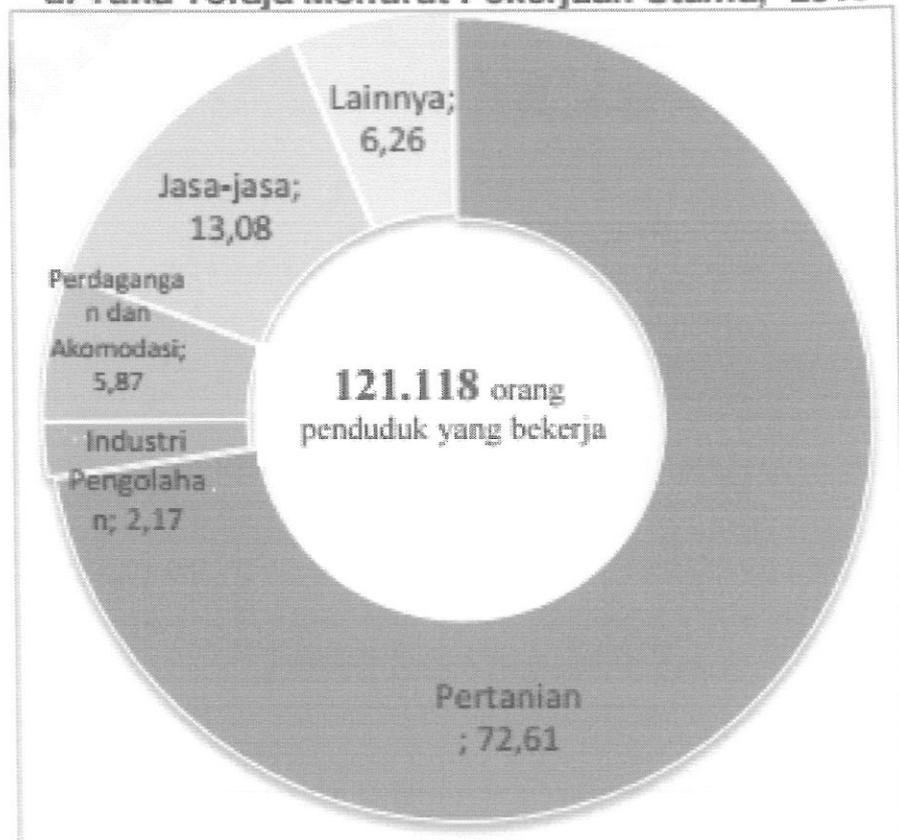
Dilihat dari tingkat pendidikan, tahun 2015, penduduk bekerja di Tana Toraja didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan sampai Sekolah Dasar yang mencapai 45 persen. Dari total penduduk bekerja, 47,25 persen adalah perempuan dimana 84,94 persen bekerja di pedesaan.

**Statistik Ketenagakerjaan Tana Toraja  
Tahun 2012 - 2015**

Uraian	2012	2013	2014	2015
Angkatan Kerja (orang)	111.070	101.741	120.909	126.148
TPAK (%)	76,25	70,55	80,31	82,79
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,63	3,26	3,26	3,99
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	95,67	96,74	96,74	96,01

Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja, 2013-2016

**Persentase Penduduk yang Bekerja  
di Tana Toraja Menurut Pekerjaan Utama, 2015**



Sumber: BPS Kabupaten Tana Toraja 2016

### **B.2. BPJS Ketenagakerjaan**

Melihat jumlah angkatan kerja dan sektor bidang kerja utama di Kabupaten Tana Toraja di atas, jumlah kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan masih sangat minim. Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat, dari 651 perusahaan yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, hanya 5.477 orang pekerja yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara untuk tenaga kerja mandiri seperti pedagang sayur, sopir mobil angkut, pedagang kaki lima, tukang ojek, buruh bangunan, hanya 1.600 orang yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan.

### **B.3. Temuan bidang ketenagakerjaan**

1. Hingga saat ini, pemerintah daerah kabupaten Tana Toraja masih belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang diharapkan dapat mendukung peningkatan keahlian penduduk bekerja dan yang akan bekerja sehingga dapat menekan angka pengangguran. Selain itu mengingat kabupaten Tana Toraja merupakan daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah dan negara, perlu keterampilan khusus untuk penduduk terutama ketrampilan bahasa asing.
2. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tana Toraja masih sangat minim bila dilihat dari jumlah pekerja yang ada. Dari jumlah peserta yang terdaftar, 30 persen kepesertaan merupakan peserta pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU).

## **V. REKOMENDASI**

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan agar memperhatikan dan memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk mempersiapkan adanya RS Pariwisata di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan agar memprioritaskan Kabupaten Tanatoraja sebagai lokasi penempatan bagi program WKDS dan Nusantara Sehat.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk mengkaji kemungkinan dilakukannya diskresi terhadap pengadaan PNS terutama untuk pemenuhan SDM Kesehatan di Kabupaten Tanatoraja
4. Komisi IX DPR RI mendesak kepada BPJS Kesehatan agar meningkatkan cakupan kepesertaan terutama dari peserta non PBI serta mensosialisasikan dan mendiskusikan pengintegrasian jamkesda ke dalam BPJS bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tanatoraja Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Komisi IX DPR RI mendesak kepada Badan POM RI untuk memprioritaskan pembangunan Balai POM di Kabupaten Tanatoraja mengingat cakupan wilayah pengawasannya sangat luas.

6. Komisi IX DPR RI mendesak kepada BKKBN agar program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.
7. Komisi IX DPR RI mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk memaksimalkan sosialisasi kepada pekerja di Kabupaten Tana Toraja bekerjasama dengan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Tana Toraja serta instansi terkait lainnya sehingga kepesertaan pekerja dapat meningkat.
8. Dalam mendukung peningkatan ketrampilan pekerja, Komisi IX DPR RI mendorong pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Tana Toraja yang hingga saat ini belum ada. Mengingat tingginya jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang ada terutama di bidang pertanian dan pariwisata.

## VI. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI ke Kabupaten Tanatoraja Provinsi Sulawesi Selatan pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017 – 2018 yang telah dilaksanakan mulai tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan program pemerintah di daerah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan khususnya di Kabupaten Tanatoraja Provinsi Sulawesi Selatan.

Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR-RI, Pemerintah Daerah, para Kepala Dinas, dan Instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Tim Komisi IX DPR RI di Kabupaten Tanatoraja Provinsi Sulawesi Selatan, kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, Agustus 2018**

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE KABUPATEN TANATORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KETUA TIM,**

**PIUS LUSTRILANANG, S.IP.,M.Si**

**A-380**